

LAPORAN KINERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

2019

KATA PENGANTAR

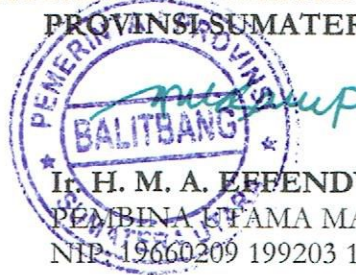
Berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Balitbang Provsu) disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Balitbang Provsu ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2018, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan Laporan Kinerja khususnya Balitbang Provsu sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Gubernur dan masyarakat Sumatera Utara.

Medan, Januari 2019

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
PENBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660209 199203 1 004

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. LATAR BELAKANG | 1 |
| | B. TUGAS DAN FUNGSI | 1 |
| | C. ASPEK STRATEGIS | 2 |
| | D. STRUKTUR ORGANISASI | 3 |
| | E. SUMBER DAYA MANUSIA | 5 |
| | F. SARANA DAN PRASARANA | 6 |
| | G. PERMASALAHN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG SUDAH DIHADAPI | 8 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| | A. RENCANA STRATEGIS | 9 |
| | B. INDIKATOR KINERJA UTAMA | 11 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| | A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 12 |
| | B. REALISASI ANGGARAN | 44 |
| BAB IV | PENUTUP | 51 |
| | A. KESIMPULAN | 51 |
| | B. SARAN | 51 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| LAMPIRAN : | 1. Indikator Kinerja Utama |
| | 2. Penetapan Kinerja Tahun 2018 |

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder , yang dituangkan melalui Laporan Kinerja.

Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebagai instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan Rencana Strategis Balitbang Provsu 2013 – 2018 dalam sebuah Laporan Kinerja BalitbangProvsu Tahun 2018.

B TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C ASPEK STRATEGIS

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga Teknis yang melakukan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :

1). Kelembagaan

Kelembagaan Balitbang Provsu mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

2). Peranan

Berdasarkan tugas dan fungsi, secara umum merubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik agar mampu bersaing dengan negara – negara maju lainnya, dan secara khusus mengarahkan agar kualitas kebijakan dan perencanaan program pembangunan daerah menjadi lebih matang, berusia lama, relevan dengan kebutuhan serta dapat menyelesaikan isu–isu strategis yang dihadapi.

Berdasarkan tahapan waktu, peran di awal sebagai Input dalam proses penyusunan kebijakan strategis, peran antara untuk memberikan berbagai rekomendasi dalam implementasi program pembangunan daerah yang tengah berjalan baik sebagai kontrol maupun katalisator, dan peran di akhir untuk memberikan masukan dan

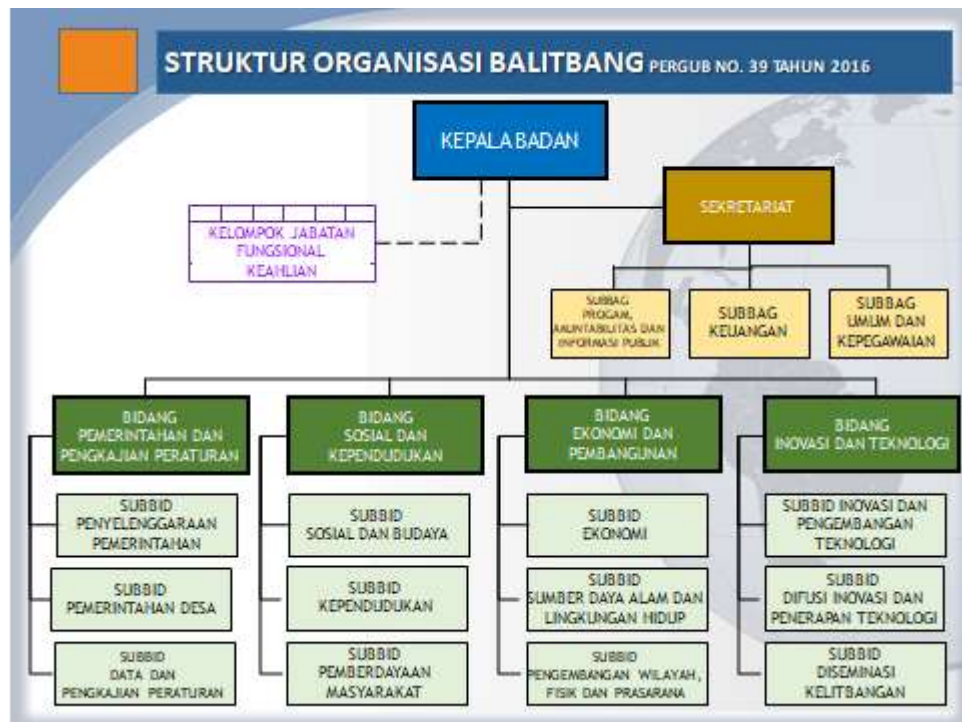
penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bentuk evaluasi, untuk dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.



Gambar 1. Peran strategis balitbang

D STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 15 Orang Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian dan kelompok fungsional. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur organisasi Balitbang Provsu

- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan 3 (tiga) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Kependudukan;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup;
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, fisik dan prasarana.

- f. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

E SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Orang) |
|----|---------------------------------|----------------|
| 1 | Jumlah SDM per 31 Desember 2018 | 50 |
| 2 | Mutasi selama tahun 2016 : | |
| | Pensiun | 2 |
| | Mutasi (masuk) | 2 |
| | Mutasi keluar | - |
| | Meninggal | - |
| 3 | Jumlah SDM per 31 Desember 2018 | 50 |

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan Jenjang Jabatan (Peran).

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------------------|--------|
| 1 | Pejabat Struktural : | |
| | - Eselon II | 1 |
| | - Eselon III | 4 |
| | - Eselon IV | 14 |
| 2 | Pejabat Fungsional Peneliti | 7 |
| 3 | Pejabat Fungsional Arsiparis | - |
| 4 | Pelaksana | 24 |
| | Jumlah | 50 |

2). Berdasarkan Strata Pendidikan

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | S-3 | 0 |
| 2 | S-2 | 19 |
| 3 | S-1 | 20 |
| 4 | Diploma III | 0 |
| 5 | SLTA | 9 |
| 6 | SLTP | - |
| 7 | SD | 2 |
| | Jumlah | 50 |

3). Berdasarkan Golongan

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Golongan IV | 13 |
| 2 | Golongan III | 29 |
| 3 | Golongan II | 6 |
| 4 | Golongan I | 2 |
| | Jumlah | 50 |

F SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu per tanggal 31 Desember 2018 didukung oleh sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| 1. | Tanah | 1.340 m2 |
| 2. | Gedung dan Bangunan Kantor | 2.545 m2 |
| 3. | Peralatan dan Mesin | 1063 unit |
| 4. | Aktiva Tetap Lainnya | 879 buku |
| 5. | Kendaraan Dinas - Roda 4 - Roda 2 | 11 unit 13 unit |

Sumber : laporan mutasi barang tahun 2018

Sarana dan Prasarana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dengan kondisi seluruhnya cukup memadai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah tanah yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.477.400,-

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Bangunan Permanen yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.952.158.645,-

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Peralatan dan Mesin yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.379.005.106,-

4. Aset Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah berupa buku perpustakaan yang kondisinya cukup baik, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 69.967.800,-

5. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.818.703.302,-

G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi Balitbang Provsu dalam menjalankan perannya sebagai lembaga teknis yang membantu Gubernur dibidang penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM baik tenaga Fungsional Peneliti maupun Fungsional Umum juga merupakan salah satu kendala keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan teknis/ administrasi yang dilaksanakan oleh fungsional umum, dan fungsional peneliti yang diperlukan sebagai pelaksana kegiatan penelitian.
2. Adanya Moratorium penghentian penerimaan CPNS, yang mengakibatkan proses rekrutmen PNS khususnya tenaga fungsional peneliti menjadi terkendala.
3. Tentang “kepakaran peneliti”, masih menjadi masalah oleh karena tuntutan issue-issue yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan bidang studi yang dimiliki para peneliti sehingga Balitbang masih memerlukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
4. Setiap tahun Balitbang mengalokasikan anggaran untuk diklat peneliti dalam rangka menghasilkan peningkatan jumlah jabatan fungsional peneliti, namun karena anggaran Balitbang Provsu termasuk kecil, maka jumlah anggaran untuk diklat peneliti masih perlu ditambah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Renstra Balitbang Provsu) merupakan rencana tindakan kegiatan mendasar jangka panjang yang disusun dan dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah terkait, Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan pihak swasta. Renstra disusun sedemikian bersifat adaptif terhadap perubahan dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

Berdasarkan Renstra 2013 – 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang dihubungkan dengan pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengambilan keputusan dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, yaitu ” **Menjadi Balitbang yang menghasilkan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan menuju Sumatera Utara yang berdaya saing** ”, guna melaksanakan mandat tersebut secara profesional, dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, sehingga pimpinan satuan kerja beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, berdasarkan hal diatas dan untuk pencapaian Visi tersebut Balitbang Provsu mempunyai Misi , yaitu :

- 1) Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan di Provsu.
- 2) Meningkatkan kerjasama jejaring iptek dan inovasi dengan Sistim Inovasi Daerah (SIDa).
- 3) Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan hasil penelitian dan pengembangan yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu
- 2) Peningkatan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan daya saing hasil penelitian dan pengembangan yang strategis
- 2) Meningkatnya kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- 3) Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya kelitbangan dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
- 2) Meningkatkan jejaring iptek dan inovasi
- 3) Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan.

Arah kebijakan Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Penguatan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Balitbang Provsu 2013-2018.

Indikator Kinerja Utama Balitbang Provsu yang akan digunakan untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|----|--|--|
| | (1) | (2) |
| 1 | Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan | Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan |
| 2 | Meningkatnya kerjasama jejaring iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Jumlah MoU yang dihasilkan |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Realisasi kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018

| Tahun | 2018 | |
|------------------|-------------|-----------|
| | Target | Realisasi |
| Jumlah Kebijakan | 6 | 10 |
| Jumlah MoU | 1 | 1 |
| | | |

Selama tahun 2018 target kinerja untuk jumlah kebijakan sebanyak 6 (enam) dan realisasinya 10 (sepuluh) , yang terdiri dari :

1. Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Sumatera Utara.
- Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.
- Untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk megoptimalkan implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur berkaitan dengan BUM Desa, terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUM Desa-

BUM Desa baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di Sumatera Utara, agar BUM Desa-BUM Desa yang ada dapat berkembang dengan baik.

2. Studi Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara;
- Untuk mengetahui Peranan Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk megoptimalkan peranan dari Sekretaris Desa di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk rekomendasi agar dapat dilakukannya program-program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka meningkatkan peranan dari para Sekretaris Desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Kepala Desa dan mewujudkan pembangunan Desa yang maju dan mandiri sesuai dengan dokumen RPJM Desa.

3. Sinergitas Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pembinaan terhadap sinergitas antara Kepala Desa dan BPD di Sumatera Utara.
- Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sinergitas antara Kepala Desa dan BPD di Sumatera Utara.
- Untuk merekomendasikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terkait kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan

untuk meningkatkan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur hubungan yang sinergi antara Kepala Desa dan BPD, dan terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perwujudan hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD, agar Kepala Desa dan BPD dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik.

4. Identifikasi Puncak-Puncak Kebudayaan Daerah Pada Daerah-Daerah Wisata di Sumatera Utara

Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk:

- Mengidentifikasi cagar budaya yang dapat dijadikan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata berbasis kebudayaan di Sumatera Utara.
- Menganalisis pengelolaan puncak-puncak kebudayaan daerah untuk dapat dijadikan sebagai destinasi wisata andalan berbasis kebudayaan pada daerah-daerah wisata di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- Memberikan layanan informasi dalam bentuk laporan penelitian kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemerintah baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota terkait puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata budaya di Sumatera Utara.
- Memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala OPD terkait pemanfaatan puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata budaya di Sumatera Utara.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Sumatera Utara

Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan partisipasi masyarakat serta tingkatan partisipasinya dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.
- Mendeskripsikan kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.
- Merancang model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- Bagi pemerintah, menjadi pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat berdasarkan undang- undang anggaran dana desa.
- Bagi masyarakat, melalui penelitian ini dapat memberi kesempatan bagi masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi pembangunan desa.

6. Implementasi dan Optimalisasi Program Kampung KB di Pantai Timur Sumatera Utara

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- Menganalisis apakah yang menjadi prioritas utama dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
- Menganalisis apakah yang menjadi alasan untuk mempertahankan prestasi dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
- Menganalisis apakah yang menjadi prioritas rendah dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
- Menganalisis apakah yang menjadi berlebihan dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

- Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi implementasi Kampung KB.
- Sebagai bahan referensi dan pemetaan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kampung KB

7. Kajian Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Dalam Pelestarian Lingkungan di Sumatera Utara.

Tujuan :

- Mengetahui hasil evaluasi pengelolaan KKP berdasarkan keputusan direktorat jendral kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil nomor Kep.44/KP3K/2012 terhadap KKP Pencadangan dan yang telah ditetapkan di Sumatera Utara.
- Mengetahui bentuk kelembagaan dan manajemen KKP yang dapat diimplementasikan berdasarkan pendapat stakeholder terkait di Sumatera Utara.
- Mengetahui prinsip pengelolaan prioritas KKP yang dapat diimplementasikan berdasarkan pendapat stakeholder terkait di Sumatera Utara.

Manfaat :

- Sebagai referensi kebijakan bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya pengelolaan KKP di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- Sebagai referensi akademis bagi berbagai penelitian dan atau kajian yang akan dilakukan di kemudian hari

8. Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Untuk Membangun Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pedesaan di Desa-Desa Pada Wilayah HGU Perkebunan di Sumatera Utara

Tujuan :

- Mendeskripsikan kondisi faktual Pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.
- Menelusuri berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam usaha pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.
- Menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait pengoptimalan dana desa dalam usaha pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.

Manfaat :

- Sebagai informasi bagi berbagai pihak mengenai pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.
- Sebagai Informasi bagi berbagai pihak mengenai usaha pengoptimalan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa di desa-desa yang berada pada wilayah HGU di Sumatera Utara.

9. Dampak Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai Terhadap Good Governance di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tujuan :

- Menganalisis Implementasi Kebijakan transaksi npn-tunai di pemerintah provinsi sumatera utara
- Menganalisis dampak implementasi kebijakan transaksi non tunai terhadap good governance di pemerintah provinsi sumatera utara berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
- Mendeskripsikan kendala dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai untuk mencapai good governance di pemerintah provinsi sumatera utara.

Manfaat :

- Memberikan layanan informasi dalam bentuk laporan penelitian kepada seluruh ASN pemerintah provinsi sumatera utara terkait dampak kebijakan transaksi non tunai terhadap kinerja ASN
- Memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala OPD terkait penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.

10. Analisis kebutuhan teknologi dan inovasi dalam upaya penguatan usaha mikro di Sumatera Utara

Tujuan :

- Untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan inovasi untuk penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.
- Untuk menganalisa kebutuhan teknologi dan inovasi yang tepat bagi penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.
- Untuk mendesain sebuah aplikasi teknologi dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dalam upaya penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

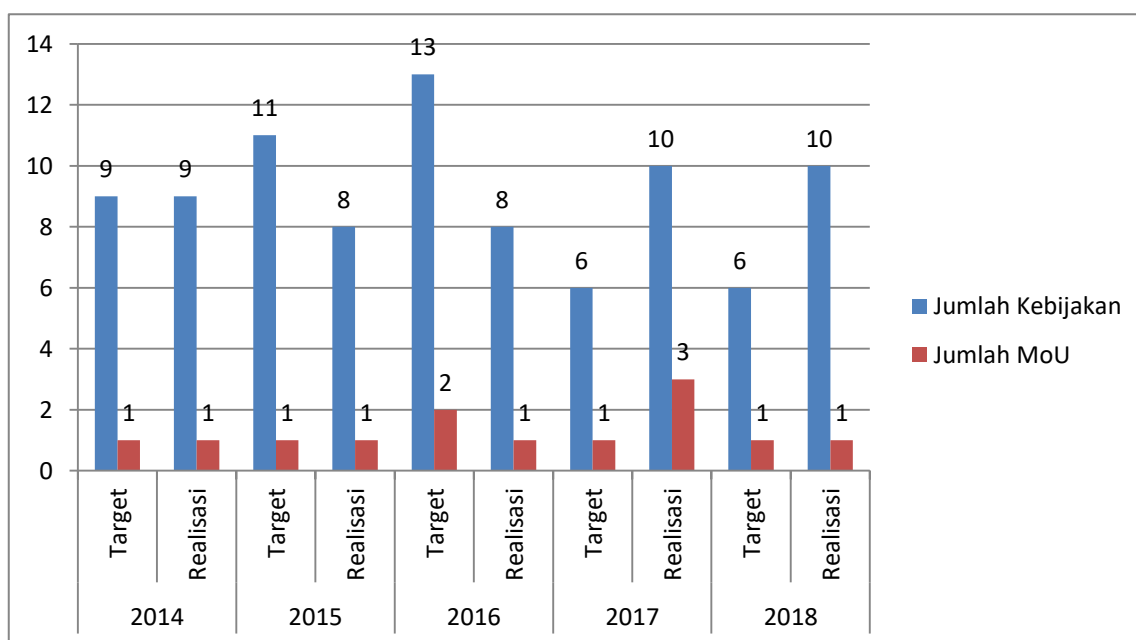
Manfaat :

1. Sebagai sumber data dan informasi tentang jenis-jenis teknologi dan inovasi yang dibutuhkan usaha mikro di Sumatera Utara.
2. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholders dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi bagi penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

Sedang jumlah MoU targetnya 1(satu) dan realisasinya 1 yatu Kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

| Tahun | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | RPJMD 2013 - 2018 | |
|------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Jumlah Kebijakan | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 45 | 45 |
| Jumlah MoU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |



Dari Tabel dapat dilihat pada:

- **Tahun 2014** terdapat 9 (Sembilan) target kebijakan yang harus tercapai dan realisasi 9 (Sembilan) kebijakan yang tercapai yaitu :
 1. Kajian Pengaruh Potensi Fiskal dan Kebutuhan Fiskal Dalam Model Penyusunan Alokasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
 - a. Tersusunnya model alokasi Bantuan Daerah Bawahan untuk kabupaten/kota di Sumatera Utara.
 - b. Dapat diidentifikasi variabel Potensi Fiskal dan Kebutuhan Fiskal Dalam Model Penyusunan Alokasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Terbentuknya rekomendasi yang ideal atas penyempurnaan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2013 tentang Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Provinsi Sumatera Utara.
 2. Kajian Perlindungan Atas Hak-hak Narapidana selama mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara.
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
 - a. Masyarakat, dapat mengetahui hak-hak narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai acuan untuk membuat regulasi mengenai upaya perlindungan atas hak-hak narapidana selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara.
 - c. Sebagai bahan edukasi kepada para pendidik dan bahan informasi kepada pihak-pihak terkait.
 3. Identifikasi Potensi Peluang Ekspor Komoditi Unggulan Daerah di Sumatera Utara.
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah :
Sebagai sumber data dan informasi untuk peningkatan potensi komoditi unggulan pertanian daerah Sumatera Utara di Sumatera Utara.
Sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan daya saing komoditi unggulan pertanian daerah di Sumatera Utara.
Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholders dalam kebijakan peningkatan ekspor komoditi unggulan pertanian daerah di Sumatera Utara.
 4. Evaluasi Sistem Irigasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Tersedianya data atau informasi tentang kinerja pelaksanaan program ketahanan pangan di Sumatera Utara.
 - b. Tersedianya data atau informasi tentang kinerja eksisting sistem irigasi dalam mendukung program ketahanan pangan di Sumatera Utara.
 - c. 3. Tersedianya bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem irigasi dalam mendukung program ketahanan pangan di Sumatera Utara.
5. Kajian Model Informasi Pasar Buah – buahan di Sumatera Utara.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan kajian ini :

- a. Sebagai sumber data dan informasi untuk pengembangan model informasi pasar komoditi buah-buahan di Sumatera Utara.
 - b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan model informasi pasar komoditi buah-buahan di Sumatera Utara.
 - c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam kebijakan pengembangan model informasi pasar komoditi buah-buahan di Sumatera Utara.
6. Kajian Distribusi Guru di Sumatera Utara.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan :

- a. Kesenjangan guru SD antar daerah masih tinggi karena distribusi guru merata. Rata-rata daerah kota memiliki jumlah guru PNS diatas jumlah rombelnya, sementara ada 10 kabupaten memiliki guru PNS dibawah jumlah rombelnya (Padang Sidempuan, Medan, Nias Selatan, Nias Utara, dll.)
 - b. Jumlah guru SD Negeri di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara sebanyak 85.998 orang, hanya 63% (atau 54.637 orang) diantaranya guru PNS. Dengan jumlah SD Negeri sebanyak 8.186 unit dan jumlah rombel sebanyak 53.474, hanya dibutuhkan 64.574 orang guru, terdiri sejumlah 53.474 orang guru kelas, 5.146 guru mapel Penjaskes dan 5.954 guru Agama. Bila hanya menghitung guru PNS di Sumatera Utara saja maka baru terpenuhi 84% dari kebutuhan, atau masih kekurangan 9.937 orang untuk mengisi di SD Negeri (tanpa mempertimbangkan status sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran).
7. Penelitian Hak Kesehatan Anak di wilayah Pesisir Sumatera Utara. Kesimpulan dari penelitian ini :
- a. Hak-hak anak dalam bidang kesehatan di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Utara yang telah dipenuhi dengan relatif baik melalui program-program kesehatan yang

dilaksanakan oleh puskesmas adalah: hak anak untuk ditolong penolong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, hak untuk diberikan imunisasi, hak untuk mendapatkan pelayanan gizi, dan hak untuk mendapatkan edukasi tentang kesehatan.

- b. Hak-hak anak yang belum mendapatkan pemenuhan dengan baik adalah: hak untuk mendapatkan ASI eksklusif, hak untuk mendapatkan tempat bermain, hak untuk mendapatkan kesehatan lingkungan.
- c. Hambatan-hambatan pemenuhan hak-hak anak tersebut adalah: 1) persepsi masyarakat yang masih belum baik terutama dalam hal ASI eksklusif dan imunisasi, 2) kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun terutama menyangkut pemberian makanan pada anak di usia dini, 3) pemerintah dan masyarakat yang belum membangun sarana bermain anak yang layak, 4) perilaku buruk masyarakat pesisir dalam memperlakukan lingkungannya, 5) kemiskinan sumber daya manusia masyarakat pesisir meliputi: kemiskinan ekonomi, pendidikan, yang memberi kontribusi terhadap perilakunya.

8. Kajian Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Energi di Sumatera Utara.

tujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal pengembangan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan lokal yang ada sebagai sumberdaya energi listrik di daerah terpencil yang belum terlistriki di Sumatera Utara.
- b. Menentukan strategi alternatif pengembangan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan lokal yang ada sebagai sumberdaya energi listrik di daerah terpencil yang belum terlistriki di Sumatera Utara.
- c. Menentukan prioritas strategi pengembangan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan lokal yang ada sebagai sumberdaya energi listrik di daerah terpencil yang belum terlistriki di Sumatera Utara.

9. Kajian Peran Sektor Pertambangan dalam upaya menuju Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui kontribusi sektor pertambangan dalam mendorong terciptanya konvergensi ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan PDRB.
- b. Menentukan sektor-sektor yang potensial, sehingga dapat dijadikan prioritas

untuk dikembangkan lebih lanjut dalam menuju keseimbangan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Target MoU untuk Tahun ini 1(satu) dan realisasi 1 (satu) berarti tercapai target 100 %;

- **Tahun 2015** terdapat 11 (sebelas) target kebijakan yang harus dicapai dan realisasi 8 (delapan) kebijakan atau capaian target 72,72%, yaitu :

1. Kajian pengembangan sistem rekrutmen jabatan birokrasi dalam rangka biokrasi reformasi di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat penelitian adalah dapat dijadikan salah satu dasar kebijakan bagi kepala daerah untuk mewujudkan *good government and clean governmence* sebagai perwujudan reformasi birokrasi dalam merekrut pejabat birokrasi (jabatan Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama) dengan seleksi terbuka di Sumatera Utara.

2. Kajian Peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan di Sumatera Utara.

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

- a. Mengetahui peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pembinaan terhadap Kabupaten Kota di Sumatera Utara.
- b. Mengetahui peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan di Sumatera Utara.
- c. Mengetahui bentuk Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik daerah dengan peranan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Analisis ketimpangan pembangunan dalam wilayah dan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

- a. Sebagai sumber data dan informasi tentang ketimpangan pembangunan dalam wilayah dan antar wilayah serta pengklasifikasian wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur di Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan dalam wilayah dan antar wilayah

Pantai Barat dan Pantai Timur di Sumatera Utara.

- c. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dan *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan pembangunan dalam wilayah dan antar wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur di Sumatera Utara.

4. Kajian pengembangan komoditas hortikultura dalam upaya menjaga stabilitas harga di Sumatera Utara.

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumber data dan informasi untuk pengembangan komoditas hortikultura dalam upaya menjaga stabilitas harga di Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan komoditas hortikultura di Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam mengatasi fluktuasi harga komoditas hortikultura di Sumatera Utara.

5. Pemetaan potensi kerajinan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mendorong peningkatan produksi dan pemberdayaan pelaku kerajinan untuk:

- a. Mengetahui gambaran kondisi kerajinan masyarakat di Sumatera Utara
- b. Mendorong pengembangan industri kerajinan masyarakat di Sumatera Utara
- c. Menentukan produk-produk kerajinan unggulan Sumatera Utara
- d. Menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku industri kerajinan masyarakat Sumatera Utara

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi pelaku industri kerajinan, sebagai pedoman dalam pengembangan industri kerajinan yang mereka tekuni.

6. Kajian Profesionalisme guru tingkat pendidikan dasar di Sumatera Utara.

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada tenaga pendidik atau guru baik yang bersifat teoretis dan praktis.

Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi guru-guru, pengelola, pengembang, dan lembaga-lembaga pendidikan serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang membahas dan meneliti permasalahan yang sama.

Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan:

- a. Bahan informasi bagi Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta lembaga terkait mengenai profil profesionalisme guru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- b. Bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki khususnya kemampuan profesionalisme dalam pembelajaran.
- c. Bahan informasi dan masukan bagi peneliti lain tentang kesesuaian profesionalisme guru sehingga dapat menjadi bahan acuan atau dasar penelitian lanjutan mengenai kompetensi guru.

7. Kajian pengembangan wilayah berbasis potensi mineral di Sumatera Utara.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan kajian ini:

Hasil kegiatan penelitian ini dapat menjadi landasan atau kerangka konsep bagi kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan isu-isu strategis sector pertambangan yang diwujudkan dalam konsep pengembangan wilayah secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat menjadi pedoman daerah dalam menyusun rencana pembangunan Provinsi Sumatera Utara

8. Kajian pengembangan sentra produksi garam di Pantai Barat Sumatera Utara.

Menjadi dasar dan acuan data dalam perencanaan dan penyusunan program pengembangan budidaya tambak garam oleh pemerintah pusat dan daerah di Sumatera Utara yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat lokal.

Target MoU untuk Tahun ini 1(satu) dan realisasi 1 (satu) berarti tercapai target 100 %.

- **Tahun 2016** terdapat 13 (tiga belas) target kebijakan yang harus dicapai dan realisasi sebanyak 8 (delapan) kebijakan yang berarti tercapai 61,53%.

Penelitian dan Kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2016 di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui langkah apa yang diambil pemerintah Provinsi/Kabupaten menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat

pemerintah daerah terkait, dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

- b. Mengetahui langkah yang diambil oleh pemerintah daerah bagi menyusun Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi.

2. Kajian Kebijakan Pelayanan Publik dalam Mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Sumatera Utara.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- b. Sebagai bahan evaluasi kesiapan Provsu baik dari sisi regulasi, infrastruktur, bentuk pelayanan, sumber daya manusia dan program yang diterapkan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- c. Menyelaraskan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan dukungan Provsu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- d. Meningkatkan kerjasama Provsu dan Pemerintah Pusat atas kekurangan yang ada dan memberikan perbaikan yang diperlukan atas persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

3. Analisis Kelembagaan Pemasaran Agribisnis di kawasan sentra produksi Pertanian di Sumatera Utara.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumber data dan informasi tentang bentuk atau model kelembagaan pemasaran agribisnis di kawasan sentra produksi pertanian di Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan agribisnis di kawasan sentra produksi pertanian di Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pengembangan model kelembagaan pemasaran agribisnis di kawasan sentra produksi pertanian di Sumatera Utara.

4. Analisis Kebijakan Tata Niaga Komoditas Pangan Strategis di Sumatera Utara.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumber data dan informasi mengenai saluran, lembaga, fungsi, struktur dan perilaku pasar tata niaga; efisiensi tata niaga serta faktor-faktor yang mempengaruhi margin pemasaran, harga ditingkat petani dan harga ditingkat konsumen komoditas pangan strategis di Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan tata niaga komoditas pangan strategis di Sumatera

Utara.

- c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder guna untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara.

5. Kajian Perlindungan Terhadap Hak-hak Buruh Perempuan dan Anak di Sumatera Utara.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan dan anak bekerja ?
- b. Apa permasalahan dan bagaimana perlindungan hak-hak buruh perempuan dan pekerja anak ?

Sasaran penelitian ini bagi pemerintah untuk memperhatikan industri-industri dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak pekerja /buruh perempuan dan anak yang menjadi pekerja/buruhnya, dan bagi pekerja/buruh dan anak lebih mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-undang sehingga tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh pengusahanya.

6. Analisis Kebutuhan SMK untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Adapun tujuan penelitian ini :

- a. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Gubernur Sumatera Utara dalam merencanakan penyediaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka mendukung pengembangan dan keberlanjutan MP3EI KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara.
- b. Bagi otoritas MP3EI KEK Sei Mangkei sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan dukungan pemberian SMK yang menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan terintegrasi dengan otoritas MP3EI Sei Mangkei yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Bagi Masyarakat, dapat menambah sarana pendidikan pada jenjang menengah bidang kejuruan yang dipersiapkan dapat memenuhi lapangan kerja dan menambah wawasan masyarakat dalam memilih dan menentukan alternatif jenis pendidikan untuk mendukung pengembangan MP3EI Sei Mangkei di Sumatera Utara.

7. Kajian-kajian lain yang mendukung peningkatan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim (Kajian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Utara).

Adapun manfaat penelitian ini :

- a. Sebagai sumber data dan informasi dalam pemanfaatan potensi Energi Baru

Terbarukan (EBT) berbasis sumber daya air dan matahari untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Utara.

- b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan potensi EBT di Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pengembangan potensi EBT berbasis air dan matahari melalui Desa Mandiri Energi (DME) di Sumatera Utara.

8. Kajian Peningkatan Potensi Kelautan Guna Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Kelautan di Sumatera Utara.

Adapun manfaat penelitian ini :

- a. Sebagai sumber data dan informasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kelautan sub sektor perikanan di Sumatera Utara.
 - b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan sektor kelautan di Sumatera Utara.
 - c. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pengembangan sektor kelautan di Sumatera Utara.
 - d. Adapun MoU pada Tahun ini terdapat target 1(satu) MoU dan 1 (MoU) realisasi.
- Adapun pada **Tahun 2017** target kebijakan yang harus dicapai 6 (enam) dan realisasi 10 (sepuluh) atau capaian 167%.

Penelitian dan Kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2017 di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Penelitian tentang Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi permasalahan dalam melakukan ekstensifikasi pajak Air Permukaan Umum (APU) di Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Menganalisa peran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi pajak Air Permukaan Umum (APU).
- c. Menganalisa sumber-sumber pajak Air Permukaan Umum (APU) yang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Manfaat penelitian ini Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk rekomendasi terkait masalah dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi.

2. Evaluasi dan Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rentang 10 Tahun.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, maka yang menjadi maksud dan tujuan dari kegiatan Evaluasi dan Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir ini adalah untuk :

- a. Mengetahui Kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio-rasio keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2007 s/d 2016.
- b. Menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap perekonomian makro dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara periode tahun 2007 s/d 2016.
- c. Merumuskan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pengaruh kinerja keuangan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Analisis Efektivitas Penyertaan Modal daerah pada BUMD di Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi bentuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD.
- b. Mengidentifikasi kontribusi BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menganalisis efektivitas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD.

4. Study Dampak pembangunan Jalan tol Medan – Tebing Tinggi terhadap sentra-sentra Ekonomi di Jalan Alteri Medan – Tebing Tinggi

Maksud dari penelitian ini adalah:

- a. Maksud dari kegiatan studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana dampak pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi ditinjau dari aspek sosial dan aspek ekonomi terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat di jalan arteri Medan-Tebing Tinggi.
- b. Menghasilkan suatu strategi yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji dampak pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi ditinjau dari aspek sosial terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat di jalan arteri Medan-Tebing Tinggi.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji dampak pembangunan jalan Tol Medan Tebing ditinjau dari aspek ekonomi terhadap perubahan perilaku ekonomi masyarakat di jalan arteri Medan-Tebing Tinggi.
- c. Untuk menganalisis dan mengkaji strategi solusi yang harus diambil pemerintah daerah dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi.

5. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan danau Toba).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis permasalahan usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba berdasarkan kondisi objektif kepariwisataan yang diukur melalui isu dan indikator utama pariwisata berkelanjutan.
- b. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba.

6. Prastudi Kelayakan Menciptakan Kampung Daur Ulang di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat kecamatan Hampan Perak untuk mendukung rencana kampung daur ulang.
- b. Mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Hampan Perak untuk mendukung rencana kampung daur ulang.

Tujuan penelitian ini hanya mengidentifikasi beberapa desa yang berpotensi/berpeluang untuk dijadikan sebagai “Kampung Daur Ulang”, dan belum pada tahap kelayakan pembangunan kampung daur ulang. Ketika salah satu/beberapa desa yang terpilih berpotensi/berpeluang dijadikan sebagai kampung daur ulang, maka akan dihitung tingkat kelayakan pembangunan kampung daur ulang tersebut untuk penelitian selanjutnya (*sustainability research*).

7. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja tenaga Kesehatan terhadap layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

Bagi pemerintah, menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja tenaga kesehatan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

8. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Sosial dan Kependudukan (Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dalam Melestarikan Kawasan danau Toba).

Tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum berbasis kearifan lokal serta menyesuaikannya dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah dalam melestarikan kawasan Danau Toba, baik pendidikan formal maupun nonformal.
- b. Untuk menentukan stakeholder serta tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kegiatan “pendidikan berbasis kearifan lokal dalam melestarikan kawasan Danau Toba”, baik pendidikan formal maupun nonformal.

9. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi (Analisis Kebutuhan Inovasi dan Teknologi Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Danau Toba)

Tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis jenis-jenis inovasi dan teknologi yang dibutuhkan sesuai masing-masing potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat akan kebutuhan inovasi dan teknologi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.
- c. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pemerintah (pusat, provinsi dan Kabupaten) di dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Manfaat penelitian adalah untuk:

- a. Sebagai sumber data dan informasi tentang jenis-jenis inovasidan teknologi yang dibutuhkan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

- b. Sebagai bahan evaluasi kebijakan inovasi dan teknologi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.
- c. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) dan stakeholders terkait didalam pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

10. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Pembangunan (Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Sumatera Utara).

Tujuan penelitian adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa serentak terutama peraturan daerah dan/atau peraturan Desa di wilayah kabupaten di Sumatera Utara;
- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah kabupaten pada tahun 2016 di Sumatera Utara;
- c. Melakukan analisis terhadap hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak wilayah kabupaten tahun 2016 di Sumatera Utara.

Tahun 2017 MoU melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) dan realisasinya 3 (tiga) atau 300% dari target.

- **Tahun 2018** target kebijakan yang harus dicapai 6 (enam) dan realisasi 10 (sepuluh) atau capaian 167% dan MoU 1 (satu) yang terrealisasi dari 2 (dua) yang direncanakan atau 200% dari target.

Selama tahun 2018 target kinerja untuk jumlah kebijakan sebanyak 6 (enam) dan realisasinya 10 (sepuluh) , yang terdiri dari :

1. Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Penelitian

- a. Adapun tujuan dan sasaran penelitian ini adalah:
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Sumatera Utara.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.
- d. Untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur berkaitan dengan BUM Desa, terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUM Desa-BUM Desa baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di Sumatera Utara, agar BUM Desa-BUM Desa yang ada dapat berkembang dengan baik.

2. Studi Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara;
- b. Untuk mengetahui Peranan Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peranan dari Sekretaris Desa di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk rekomendasi agar dapat dilakukannya program-program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka meningkatkan peranan dari para Sekretaris Desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi yaitu membantu

Kepala Desa dan mewujudkan pembangunan Desa yang maju dan mandiri sesuai dengan dokumen RPJM Desa.

3. Sinergitas Kepala Desa dan Badan Perumyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pembinaan terhadap sinergitas antara Kepala Desa dan BPD di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sinergitas antara Kepala Desa dan BPD di Sumatera Utara.
- c. Untuk merekomendasikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terkait kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur hubungan yang sinergi antara Kepala Desa dan BPD, dan terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perwujudan hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD, agar Kepala Desa dan BPD dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik.

4. Identifikasi Puncak-Puncak Kebudayaan Daerah Pada Daerah-Daerah Wisata di Sumatera Utara

Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi cagar budaya yang dapat dijadikan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata berbasis kebudayaan di Sumatera Utara.
- b. Menganalisis pengelolaan puncak-puncak kebudayaan daerah untuk dapat dijadikan

sebagai destinasi wisata andalan berbasis kebudayaan pada daerah-daerah wisata di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Memberikan layanan informasi dalam bentuk laporan penelitian kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemerintah baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota terkait puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata budaya di Sumatera Utara.
- b. Memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala OPD terkait pemanfaatan puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata budaya di Sumatera Utara.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Sumatera Utara

Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat serta tingkatan partisipasinya dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.
- b. Mendeskripsikan kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.
- c. Merancang model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi pemerintah, menjadi pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat berdasarkan undang-undang anggaran dana desa.
- b. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini dapat memberi kesempatan bagi masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi pembangunan desa.

6. Implementasi dan Optimalisasi Program Kampung KB di Pantai Timur Sumatera Utara

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis apakah yang menjadi prioritas utama dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
- b. Menganalisis apakah yang menjadi alasan untuk mempertahankan prestasi dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
- c. Menganalisis apakah yang menjadi prioritas rendah dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
- d. Menganalisis apakah yang menjadi berlebihan dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

- a. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi implementasi Kampung KB.
- b. Sebagai bahan referensi dan pemetaan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kampung KB

7. Kajian Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Dalam Pelestarian Lingkungan di Sumatera Utara.

Tujuan :

- a. Mengetahui hasil evaluasi pengelolaan KKP berdasarkan keputusan direktorat jendral kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil nomor Kep.44/KP3K/2012 terhadap KKP Pencadangan dan yang telah ditetapkan di Sumatera Utara.
- b. Mengetahui bentuk kelembagaan dan manajemen KKP yang dapat diimplementasikan berdasarkan pendapat stakeholder terkait di Sumatera Utara.
- c. Mengetahui prinsip pengelolaan prioritas KKP yang dapat diimplementasikan berdasarkan pendapat stakeholder terkait di Sumatera Utara.

Manfaat :

- a. Sebagai referensi kebijakan bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya pengelolaan KKP di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebagai referensi akademis bagi berbagai penelitian dan atau kajian yang akan

dilakukan di kemudian hari

8. Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Untuk Membangun Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pedesaan di Desa-Desa Pada Wilayah HGU Perkebunan di Sumatera Utara

Tujuan :

- a. Mendeskripsikan kondisi faktual Pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.
- b. Menelusuri berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam usaha pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.
- c. Menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait pengoptimalan dana desa dalam usaha pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.

Manfaat :

- a. Sebagai informasi bagi berbagai pihak mengenai pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara.
- b. Sebagai Informasi bagi berbagai pihak mengenai usaha pengoptimalan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa di desa-desa yang berada pada wilayah HGU di Sumatera Utara.

9. Dampak Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai Terhadap Good Governance di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tujuan :

- a. Menganalisis Implementasi Kebijakan transaksi npn-tunai di pemerintah provinsi Sumatera Utara
- b. Menganalisis dampak implementasi kebijakan transaksi non tunai terhadap good governance di pemerintah provinsi Sumatera Utara berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
- c. Mendeskripsikan kendala dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai untuk mencapai good governance di pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Manfaat :

- a. Memberikan layanan informasi dalam bentuk laporan penelitian kepada seluruh ASN pemerintah provinsi Sumatera Utara terkait dampak kebijakan transaksi non tunai terhadap kinerja ASN
- b. Memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala OPD terkait penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.

10. Analisis kebutuhan teknologi dan inovasi dalam upaya penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

Tujuan :

- a. Untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan inovasi untuk penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.
- b. Untuk menganalisa kebutuhan teknologi dan inovasi yang tepat bagi penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.
- c. Untuk mendesain sebuah aplikasi teknologi dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dalam upaya penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

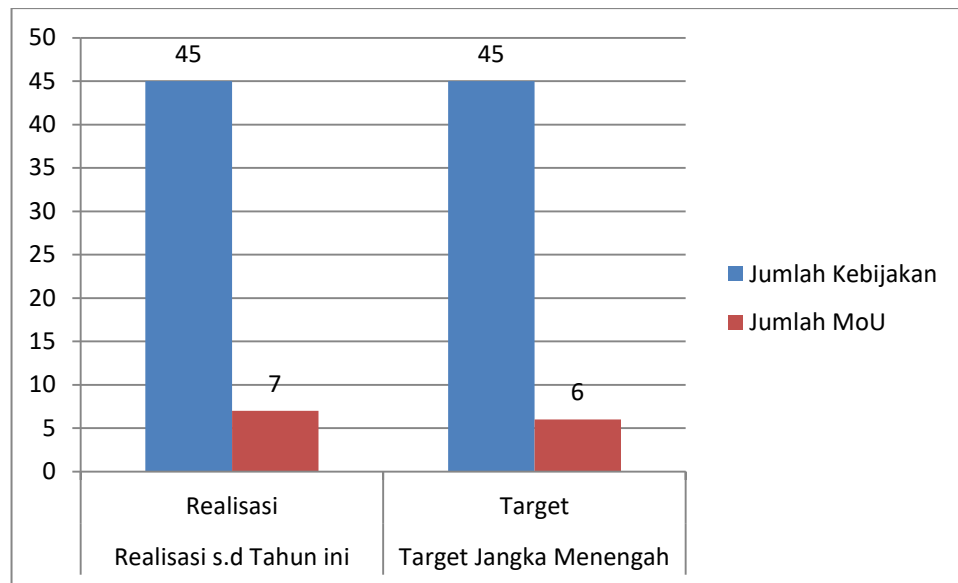
Manfaat :

- a. Sebagai sumber data dan informasi tentang jenis-jenis teknologi dan inovasi yang dibutuhkan usaha mikro di Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholders dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi bagi penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

Sedang jumlah MoU targetnya 1(satu) dan realisasinya 1 yatu Kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| | Realisasi s.d. Tahun ini | Target Jangka Menengah |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Realisasi | Target |
| Jumlah Kebijakan | 45 | 45 |
| Jumlah Mou | 7 | 6 |



Berdasarkan Tabel Rencana Strategis Jangka Menengah tahun 2013 – 2018 terdapat 45 Kebijakan yang direalisasikan yaitu :

1. Kajian Pengaruh Potensi Fiskal dan Kebutuhan Fiskal Dalam Model Penyusunan Alokasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara
2. Kajian Perlindungan Atas Hak-hak Narapidana selama mendekam dalam Lembaga Perasyarakatan di Sumatera Utara.
3. Identifikasi Potensi Peluang Ekspor Komoditi Unggulan Daerah di Sumatera Utara
4. Evaluasi Sistem Irigasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Kajian Model Informasi Pasar Buah – buahan di Sumatera Utara.
6. Kajian Distribusi Guru di Sumatera Utara.
7. Penelitian Hak Kesehatan Anak di wilayah Pesisir Sumatera Utara.
8. Kajian Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Energi di Sumatera Utara.
9. Kajian Peran Sektor Pertambangan dalam upaya menuju Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
10. Kajian pengembangan sistem rekrutmen jabatan birokrasi dalam rangka biokrasi reformasi di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
11. Kajian Peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan di Sumatera Utara.
12. Analisis ketimpangan pembangunan dalam wilayah dan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

13. Kajian pengembangan komoditas hortikultura dalam upaya menjaga stabilitas harga di Sumatera Utara.
14. Pemetaan potensi kerajinan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
15. Kajian Profesionalisme guru tingkat pendidikan dasar di Sumatera Utara.
16. Kajian pengembangan wilayah berbasis potensi mineral di Sumatera Utara.
17. Kajian pengembangan sentra produksi garam di Pantai Barat Sumatera Utara.
18. Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara.
19. Kajian Kebijakan Pelayanan Publik dalam Mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Sumatera Utara.
20. Analisis Kelembagaan Pemasaran Agribisnis di kawasan sentra produksi Pertanian di Sumatera Utara.
21. Analisis Kebijakan Tata Niaga Komoditas Pangan Strategis di Sumatera Utara.
22. Kajian Perlindungan Terhadap Hak-hak Buruh Perempuan dan Anak di Sumatera Utara.
23. Analisis Kebutuhan SMK untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
24. Kajian-kajian lain yang mendukung peningkatan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim (Kajian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Utara).
25. Kajian Peningkatan Potensi Kelautan Guna Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Kelautan di Sumatera Utara.
26. Penelitian tentang Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.
27. Evaluasi dan Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rentang 10 Tahun.
28. Analisis Efektivitas Penyertaan Modal daerah pada BUMD di Sumatera Utara.
29. Study Dampak pembangunan Jalan tol Medan – Tebing Tinggi terhadap sentra-sentra Ekonomi di Jalan Alteri Medan – Tebing Tinggi
30. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan danau Toba).
31. Prastudi Kelayakan Menciptakan Kampung Daur Ulang di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
32. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja tenaga Kesehatan terhadap layanan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

33. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Sosial dan Kependudukan (Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dalam Melestarikan Kawasan danau Toba).
34. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi (Analisis Kebutuhan Inovasi dan Teknologi Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Danau Toba)
35. Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Pembangunan (Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Sumatera Utara).
36. Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Utara
37. Studi Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara
38. Sinergitas Kepala Desa dan Badan Perumyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara
39. Identifikasi Puncak-Puncak Kebudayaan Daerah Pada Daerah-Daerah Wisata di Sumatera Utara
40. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Sumatera Utara
41. Implementasi dan Optimalisasi Program Kampung KB di Pantai Timur Sumatera Utara
42. Kajian Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Dalam Pelestarian Lingkungan di Sumatera Utara.
43. Manajemen Pemanfaatan Dana Desa Untuk Membangun Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pedesaan di Desa-Desa Pada Wilayah HGU Perkebunan di Sumatera Utara
44. Dampak Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai Terhadap Good Governance di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
45. Analisis kebutuhan teknologi dan inovasi dalam upaya penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

Target sebanyak 6(enam) MoU dan tercapai sebanyak 7 (tujuh) MoU, yaitu :

1. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Balai Pengkajian teknologi Pertanian Sumatera Utara, Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pengembangan Komoditas Hilirisasi Kelapa Sawit berbasis UKM di Kabupaten Langkat untuk mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara.

2. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bupati Labuhan Batu Kerjasama Kelitbangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
5. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bupati Labuhan Batu Utara Kerjasama Kelitbangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
6. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bupati Padang Lawas Utara Kerjasama Kelitbangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
7. MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Penurunan jumlah capaian kinerja ini sesuai dengan penurunan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Namun bila dilihat dari persentase tiap tahunnya capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja mencapai 100%, artinya target tiap tahun sasaran strategis selalu tercapai.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai jumlah pegawai 50 orang, namun SDM yang khusus melaksanakan kegiatan penelitian. Fungsional Peneliti berjumlah 7 orang. Dari jumlah peneliti yang ada tersebut kiranya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kepakaran masing-masing untuk melaksanakan penelitian di Balitbang Provsu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian Penetapan Kinerja Balitbang Provsu adalah melalui

Program/Kegiatan yang mendukung untuk sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Penetapan Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2018.

Penetapan Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2018, yaitu: **Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan**, didukung oleh Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan penelitian. Dari hasil setiap pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut diharapkan mampu dijadikan sebagai rekomendasi bahan kebijakan pembangunan bagi pemerintah, yaitu sebagaimana tercantum indikator kinerja pada Penetapan kinerja yaitu Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan dan dapat dilihat dari tabel berikut :

| No | Program | Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | Persen (%) |
|------------|---|---|-----------------|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah | | | | |
| 1. | | Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 | 185.749.375 | 181.583.775 | 98 |
| 2. | | Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara | 187.799.975 | 186.720.525 | 99 |
| II. | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | | | | |
| 1. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Sosial dan Budaya | 300.000.000 | 298.812.700 | 100 |
| 2. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Kependudukan | 300.000.000 | 298.008.000 | 99 |
| 3. | | Kelitbangan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat | 300.000.000 | 299.889.420 | 100 |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|-------------|-----|
| 4. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi | 282.799.535 | 281.884.735 | 100 |
| 5. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Ekonomi | 300.000.000 | 296.742.300 | 99 |
| 6. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 300.000.000 | 299.747.250 | 100 |
| 7. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana | 297.600.000 | 296.059.600 | 99 |
| 8. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 899.999.748 | 899.814.548 | 100 |

B. REALISASI ANGGARAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BALITBANG PROVSU TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Uraian | Pagu | Realisasi | Persentase |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Belanja Langsung | 13.357.775.169,- | 13.148.965.982,- | 98,44 |
| 2. | Belanja Tidak Langsung | 9.702.044.562,- | 9.284.421.657,- | 95,70 |

Pada Tahun Anggaran 2018 total belanja langsung Balitbang Provsu adalah sebesar Rp. 13.357.775.169 ,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.702.044.562 ,- , sehingga total anggaran belanja Balitbang Provsu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23.059.819.731,-. Realisasi belanja langsung Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.148.965.982,- atau 98,44 %, sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.9.284.421.657,- Atau sebesar 95,70%. Akuntabilitas keuangan berdasarkan penetapan kinerja pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Program | Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | Persen (%) |
|----|--|--|-----------------|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| 1. | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.945.500 | 6.981.150 | 88 |
| 2. | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 283.626.100 | 245.672.411 | 87 |
| 3. | | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | 468.610.000 | 449.170.000 | 96 |
| 4. | | Operasional pegawai tidak tetap/ tenaga harian lepas kantor Balitbang Provsu | 530.349.800 | 489.399.800 | 92 |
| 5. | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 49.996.290 | 49.996.290 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------|---------------|-----|
| 6. | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 49.999.970 | 49.999.600 | 100 |
| 7. | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 49.970.000 | 49.942.500 | 100 |
| 8. | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 49.977.076 | 49.973.556 | 100 |
| 9. | | Penyediaan makanan dan minuman | 74.606.000 | 72.917.500 | 98 |
| 10. | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 234.836.000 | 230.328.094 | 98 |
| 11. | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 222.320.000 | 221.690.000 | 100 |
| 12. | | Penyediaan Jasa Keamanan | 137.040.000 | 134.400.000 | 98 |
| 13. | | Pelaksanaan Forum SKPD Balitbang Provsu | 93.812.490 | 93.792.046 | 100 |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| 1. | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 157.504.506 | 156.709.750 | 99 |
| 2. | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 3.692.242.700 | 3.692.242.700 | 100 |
| 3. | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 349.444.500 | 344.970.762 | 99 |
| 4. | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan | 20.000.000 | 19.770.000 | 99 |

| | | | | | |
|-------------|---|---|------------|------------|-----|
| III. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | |
| 1. | | Pengadaan Pakaian Dinas | 43.755.750 | 43.755.600 | 100 |
| IV. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| 1. | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 89.650.000 | 84.881.000 | 95 |
| 2. | | Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani | 50.400.000 | 49.400.000 | 98 |
| V. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | | | | |
| 1. | | Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah | 42.161.950 | 41.921.950 | 99 |
| 2. | | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 4.500.000 | 4.500.000 | 100 |
| 3. | | Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi | 14.999.900 | 14.999.900 | 100 |
| 4. | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 20.500.000 | 19.700.000 | 96 |
| 5. | | Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA APBD Balitbang Provsu | 50.000.000 | 49.599.600 | 99 |
| 6. | | Penyusunan Renja Balitbang Provsu | 74.999.920 | 71.679.920 | 96 |
| 7. | | Penyusunan LKPJ dan LPPD Balitbang Provsu | 13.499.755 | 13.370.755 | 99 |
| 8. | | Penyusunan Laporan Aset Tetap Pengelolaan Data Kepegawaian, Penerbitan Permohonan | 48.047.255 | 48.007.255 | 100 |

| | | | | | |
|------------|---|--|-------------|-------------|-----|
| | | Rekomendasi Penelitian dan Penataan Arsip | | | |
| 9. | | Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan | 29.997.000 | 29.997.000 | 100 |
| 10. | | Penyusunan Renstra Balitbang Provsu | 80.799.755 | 77.614.426 | 96 |
| VI. | Program Desiminasi Informasi Teknologi | | | | |
| 1. | | Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 99.999.700 | 99.664.380 | 100 |
| 2. | | Sentra HKI Lotus Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 94.849.950 | 94.719.150 | 100 |
| 3. | | Operasional Dewan Riset Daerah | 849.999.660 | 821.643.250 | 97 |
| 4. | | Updating Website Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 96.819.075 | 94.419.075 | 98 |
| 5. | | Penguatan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 19.996.240 | 18.921.240 | 95 |
| 6. | | Penyusunan Pedoman Kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara | 96.221.000 | 95.969.000 | 100 |
| 7. | | Penyusunan dan Penerbitan Media | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-----|
| | | Sosialisasi Balitbang Provsu | | | |
| 8. | | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara | 99.963.000 | 96.823.000 | 97 |
| 9. | | Fasilitasi dan Sosialisasi Teknologi Terapan di Sumatera Utara | 179.349.850 | 178.757.060 | 100 |
| 10. | | Diseminasi dan Evaluasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018 di Sumatera Utara | 140.499.675 | 138.431.475 | 99 |
| 11. | | Publikasi dan Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan di Sumatera Utara | 99.999.750 | 99.999.750 | 100 |
| 12. | | Pameran/Expo Inovasi dan Teknologi Tahun 2018 | 174.053.561 | 172.552.790 | 99 |
| 13. | | Sosialisasi Jakstrada dan Agenda Riset Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara | 149.996.560 | 148.636.560 | 99 |
| 14. | | Diskusi/FGD Masalah-masalah Aktual di Sumatera Utara | 94.491.614 | 92.334.714 | 98 |
| 15. | | Studi Banding Dewan Riset Daerah Sumatera Utara dengan Dewan Riset Daerah Provinsi Lain di Indonesia | 99.998.820 | 98.606.820 | 99 |
| 16. | | Penyusunan Buku Profil Dewan Riset Daerah Sumatera Utara | 99.999.115 | 99.570.815 | 100 |
| 17. | | Koordinasi dan | 134.999.155 | 132.889.555 | 98 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------------|-----|
| | | Pembinaan Litbang Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | |
| 18. | | Koordinasi dan Pembinaan Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 129.997.640 | 129.992.440 | 100 |
| 19. | | Koordinasi dan Pembinaan Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 135.000.000 | 134.067.800 | 99 |
| 20. | | Koordinasi dan Pembinaan Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi | 99.999.900 | 96.820.100 | 97 |
| 21. | | Mengikuti Peringatan Perayaan Kegiatan Hari- hari Besar | 72.000.000 | 57.600.000 | 80 |
| VII. | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah | | | | |
| 1. | | Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 | 185.749.375 | 181.583.775 | 98 |
| 2. | | Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara | 187.799.975 | 186.720.525 | 99 |
| VIII. | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | | | | |
| 1. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Sosial dan Budaya | 300.000.000 | 298.812.700 | 100 |
| 2. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Kependudukan | 300.000.000 | 298.008.000 | 99 |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|-------------|-----|
| 3. | | Kelitbangan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat | 300.000.000 | 299.889.420 | 100 |
| 4. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi | 282.799.535 | 281.884.735 | 100 |
| 5. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Ekonomi | 300.000.000 | 296.742.300 | 99 |
| 6. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 300.000.000 | 299.747.250 | 100 |
| 7. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana | 297.600.000 | 296.059.600 | 99 |
| 8. | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 899.999.748 | 899.814.548 | 100 |

BAB IV

PENUTUP

A KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Provsu pada tahun 2018 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencapaian target kinerja lebih dititik beratkan pada indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RENSTRA Balitbang Provsu dengan tidak mengesampingkan target kinerja indikator lainnya. Kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja OPD. Secara kumulatif, capaian kinerja Balitbang Provsu sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, sedangkan capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 98,44%. Apabila dilihat dari keseluruhan presentase capaian kinerja, maka kinerja Balitbang Provsu dapat dikategorikan tercapai dengan baik.

B SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mengimplementasikan hasil penelitian.
- 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif khususnya kepada para peneliti sehingga aparatur di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memiliki kompetensi yang tinggi di masing – masing bidang.
- 3) Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Sisingamangaraja No. 198 Telp. (061) 7866225, 7883016 – Fax. 7866248

Website : <http://balitbang.sumutprov.go.id>

Email : webmaster@balitbang.sumutprov.go.id

MEDAN – 20126

PERYATAAN TELAH DIREVIU
TIM LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2018. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini..

Medan, Januari 2019

Ketua Tim LK
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



H. MAKRUM RAMBE, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19650301 199003 1 004

TABEL TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

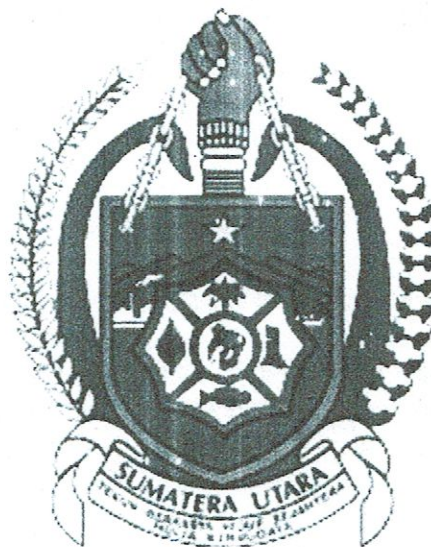
| No | Indikator Kinerja Utama | Kondisi Awal (2013) | 2016 | Realisasi s.d 2016 | Kondisi Akhir (2018) | Revisi Target Kondisi Akhir 2018 |
|-----|--|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan | 41 jenis | 8 | 25 Jenis | 65 Jenis | 45 Jenis |
| 2 | Jumlah MOU yang dihasilkan | 0 | 0 | 1 Mou | 9 Mou | 6 Mou |

Medan, 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA


Ir. H. M.A. EFFENDY POHAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660209 199203 1 004

**DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Ir. H. TENGKU ERY NURADI, M.Si
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dr. Ir. H. TENGKU ERY NURADI, M.Si



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660209 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Uraian | Anggaran |
|-----|--|--|----------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) |
| 1 | Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan | Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan | 10 Jenis | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp. 2.999.999.383 |
| 2 | Meningkatnya Kerjasama Jejaring Iptek dan Inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Jumlah MoU yang dihasilkan | 1 MoU | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Rp. 399.999.350 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------------|------------|
| 1. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Rp. 2.999.999.383,- | APBD |
| 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Rp. 399.999.350,- | APBD |
| Total | Rp. 3.399.998.733,- | |

Medan,

2018



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660208 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN : 2018**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Uraian | Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--|--|----------|--|-----------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan | Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan | 10 Jenis | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 2.999.999.283,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Sosial dan Budaya | 300.000.000,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Kependudukan | 300.000.000,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat | 300.000.000,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi | 299.999.535,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Ekonomi | 300.000.000,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 300.000.000,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana | 300.000.000,- | |
| | | | | Kelitbangan yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 899.999.748,- | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------|---|---------------|
| 2 | Meningkatnya Kerjasama Jejaring Iptek dan Inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Jumlah MoU yang dihasilkan | 1 MoU | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | 399.999.350,- |
| | | | | Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 | 199.999.375,- |
| | | | | Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara | 199.999.975,- |

Program Anggaran Keterangan

1. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Rp. 2.999.999.283,- APBD
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Rp. 399.999.350,- APBD

Medan, 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Dr. H. H. TENGGU ERY NURADI, M.Si

KEMENTERIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19660209 199203 1 004